BAB II

HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA BIRO PERJALANAN DENGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PERJALANAN

A. Terjadinya Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan dan Konsumen Jasa Perjalanan

Hubungan hukum diatur dalam hak dan kewajiban yang diberikan dan ditentukan oleh undang-undang, maka undang-undang harus mengadakan pembedaan antara hak dan kewajiban, yang timbul ketika undang-undang yang berlaku mempunyai peristiwa-peristiwa khusus yang tidak dapat dipisahkan oleh kedua belah pihak dan terikat untuk memikul suatu kewajiban.¹ Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu baik hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan dihadapan pengadilan, misalnya di dalam pemberian jasa perjalanan kepada setiap konsumen yang ingin menggunakan jasa biro perjalanan².

Hubungan hukum juga merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, h.41

² Prof Ridwan Khairandy, 2013, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h.6

tertentu. Dalam suatu hubungan hukum, hubungan antara dua pihak dimana hak menjadi milik salah satu pihak dan kewajiban menjadi milik pihak yang satunya.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum adalah hak dan kewajiban masyarakat dan individu terhadap warga negara dan orang lain dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum semua warga negara dan individu dalam kehidupan sosial. Menurut Abdulkadir Muhammad, jika hak dan kewajiban tersebut tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam hal ini, Hubungan hukum antara biro perjalanan dengan pelanggan pengguna jasa perjalanan pada hakekatnya adalah penjual jasa perjalanan dan pembeli jasa perjalanan. Kurang optimalnya pelayanan atau kelalaian penyedia jasa travel yang berujung pada kerugian sering terjadi pada konsumen/pengguna jasa travel. Kerugian yang biasa dialami konsumen antara lain fasilitas dan akomodasi yang tidak sesuai dengan yang diiklankan oleh penyedia jasa perjalanan, kehilangan harta benda dan pembatalan jadwal perjalanan.³

Pelayanan yang diberikan oleh Biro Pariwisata secara umum diklasifikasikan menjadi pelayanan destinasi dan pelayanan destinasi. Dalam praktiknya, ada klasifikasi kegiatan biro perjalanan, antara lain :

- a. Informasi Perjalanan, dapat dilihat dari promosi yang dipromosikan Biro Perjalanan.
- b. Memberikan Saran Program Perjalanan Wisata
- c. Menjual Tiket Perjalanan Wisata
- d. Mengurus Akomodasi Perjalanan Wisata
- e. Pengurusan Perjalanan Wisata.⁴

³ Septira Putri Mulyana, Febrina, 2019, Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi Di PT.Tiga Bidadari Wisata, Lombok), Jurnal Perspektif, Vol.24 Nomor 3, h.132

⁴ Op.cit., h.134.

Hubungan hukum adalah suatu perjanjian yang lahir dari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena hukum dan perjanjian. Mengenai hubungan hukum dengan pelayanan kesehatan, hubungan hukum tersebut telah disesuaikan dalam banyak peraturan perundang-undangan kesehatan berupa undang-undang, peraturan dan pedoman pelaksanaan serta disesuaikan dengan dasar kontrak pelayanan medik antara pemberi pelayanan kesehatan dan pemberi pelayanan medis. Isi hubungan hukum meliputi hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu dan sebaliknya.

Secara sederhana, *rechtsverhouding* atau hubungan hukum merupakan hubungan yang terjadi antara subjek hukum. Saat itu, pengertian yang lebih spesifik dan komprehensif dapat dicermati dari sudut pandang hubungan hukum menurut para ahli berikut ini.

Peter Mahmud Marzuki, Hubungan hukum diartikan sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh undang-undang tidak dianggap sebagai hubungan hukum.

L.J. Van Apeldoorn mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Obyek pengaturan undang-undang ini adalah hubungan yang timbul dari interaksi sosial, yang di dalamnya terdapat batas antara hak dan kewajiban. Apeldoorn juga menjelaskan bahwa setiap hubungan memiliki dua aspek, yang satu benar dan yang lainnya benar. R Soeroso mengartikan hubungan hukum adalah hubungan antara dua badan hukum atau lebih dimana satu pihak mempunyai hak dan kewajiban tetapi satu pihak mempunyai hak dan kewajiban pihak lain.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan terpaksa menanggung segala sesuatu, jika sesuatu dapat digugat, difitnah, digugat, dsb. Tanggung jawab hati nurani seseorang atas perilaku atau tindakannya yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti tindakan, ekspresi hati nurani dan kewajiban.

Lebih lanjut, Soeroso menerangkan bahwa ada tiga ciri-ciri hubungan hukum atau unsur khususnya, yakni :

- a) Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- b) Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
- c) Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Agar sebuah hubungan hukum dapat terwujud, ada sejumlah syarat-syarat khusus. Menurut H.Ishaq, ada dua syarat hubungan hukum, yaitu:

- a) Harus ada dasar hukumnya, yakni peraturan yang mengatur hubungan itu.
- b) Harus menimbulkan hubungan hukum.

Hubungan hukum tidak bisa dipisahkan dari fungsi hukum, salah satu fungsi hukum adalah melindungi anggota masyarakat, terutama mereka yang rentan akibat hubungan hukum yang timpang.⁵ Misalnya, yang terjadi dalam bidang pariwisata dimana biro perjalanan melakukan kelalaian dalam melayani pengguna jasa perjalanan sehingga terjadi hubungan hukum yang tidak seimbang.

Fungsi hukum dari sudut administrasi, realisasi suatu kebijakan diatur dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan wewenang pemerintah untuk melaksanakan tugas dan melindungi hak-hak administrasi yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum publik dan berkaitan dengan pemerintahan umum.⁶ Hubungan hukum juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab berbicara tentang hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, atau hubungan antara manusia dengan

⁵ Luh Putu Sudini, I Wayan Arthanaya, 2022, "Pengembangan Parawisata berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup" Jurnal Hukum, h.65

⁶ Isharianto, 2019, "Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)" Jurnal Tim Halamanmoeka.com, h.19

Tuhan. Isi tanggung jawab tersebut adalah kewajiban dan hak untuk dilakukan. Tanggung jawab yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban, jadi tanggung jawab adalah :

- a) Merealisasikan semua kewajiban, tanggung semua beban, tanggung semua akibat yang timbul dari perbuatan sendiri atau perbuatan orang lain, sesuai dengan standar kehidupan.
- b) Rela mengabdikan dan berkorban demi kecintaan pada kebahagiaan, kasih sayang pada lingkungan alam, agar kelestarian terpelihara sesuai standar kehidupan.
- c) Pasrah mengabdikan, menyembah, dan memuja kepada Tuhan sesuai dengan norma kehidupan beragama.

Dalam hal ini, hubungan hukum juga kerap kali terjadi antara biro penyedia jasa perjalanan dan konsumen sebagai pengguna jasa perjalanan. Biro perjalanan hakikatnya sebagai penjual jasa wisata berhubungan dengan pihak hotel maupun transportasi. Begitu juga keamanan dan kenyamanan bagi konsumen yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan dengan paket wisata yang dijual oleh biro perjalanan.⁷

Hubungan hukum yang terjadi pada kedua pihak baik biro perjalanan dan konsumen jasa perjalanan adalah ketika terjadi kesepakatan atau perjanjian antara biro perjalanan dan juga konsumen jasa perjalanan mengenai paket wisata atau rencana perjalanan yang telah disepakati hingga terjadinya transaksi.

Dan setelah terjadinya perjanjian melalui kesepakatan tersebut, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak masing-masing. Misalnya salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa perjalanan adalah dengan membayar paket wisata yang dibeli sesuai dengan harga yang ditetapkan biro perjalanan. Sementara kewajiban yang harus dipenuhi biro perjalanan adalah memberikan pelayanan yang baik dan juga

⁷ Septira Putri Mulyana, Febrina Triswati, 2019, Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi Di PT. Tiga Bidadari Wisata, Lombok), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

memberikan produk wisata sesuai yang sebagaimana dijanjikan kepada pengguna jasa perjalanan.

Saat ini ada juga terdapat kasus-kasus yang terjadi di dalam hubungan hukum antara biro perjalanan dan konsumen pengguna jasa perjalanan. Alasan utama tentu saja karena kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Misalnya kelalaian dari pihak biro perjalanan dalam mengakomodasi hotel atau maskapai penerbangan maupun pelayaran. Sehingga wisatawan atau konsumen pengguna jasa perjalanan terpaksa harus mengalami pembatalan dalam rencana perjalanan mereka.

B. Hak dan Kewajiban Kedua Pihak

Warga negara merupakan faktor penting dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang sejahtera dan aman merupakan harapan setiap masyarakat di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Negara menjamin hak-hak masyarakat di berbagai macam bidang kehidupan yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakatnya⁸.

Adanya hubungan timbal balik dalam masyarakat dan negara berorientasi pada pelaksanaan perlindungan hak warga negara yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya. Tentunya dengan kewajiban juga yang harus dilaksanakan setiap masyarakat kepada negara dengan bertanggung jawab.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung dan sebab dan akibat dapat dipisahkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di berbagai daerah seringkali mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya. Seringkali menuntut hak tanpa memperhitungkan kewajiban untuk melakukan guna memperoleh haknya.

⁸ Firda Aulia Izzati, Novitasari, 2023, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab, (*Civic Responsibility*), Jurnal Kalacakra, Vol 4, Nomor 1, 2023, h.1

Pelaksanaan hak dan kewajiban harus disertai dengan rasa tanggung jawab sehingga warga negara menyadari posisinya tidak hanya terhadap pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya oleh pihak lain tetapi juga dengan kewajiban untuk melakukan tanggung jawab dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau diperoleh bagi setiap individu secara penuh dan bertanggung jawab. Padahal, hak asasi manusia sudah dimiliki sejak dalam kandungan. Hak juga merupakan kebebasan yang dimiliki setiap manusia dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak merupakan otoritas yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Dapat juga dikatakan bahwa hak adalah hal-hal yang dimiliki setiap individu, yang dilindungi oleh hukum seperti harta benda, hak, kekuasaan atau kualifikasi dan martabat yang patut diperjuangkan, dituntut keberadaannya.

Sementara Kewajiban adalah semua hal yang harus dilakukan dan harus dilakukan oleh setiap kelompok atau individu dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara Indonesia telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaannya bersifat mengikat dan wajib.

Ambil contoh serupa, ketika kita pergi ke restoran atau konter makanan, kita harus membayar dan kita mendapatkan makanan yang kita inginkan. Transaksi pembayaran merupakan kewajiban bagi konsumen dan menerima pesanan makanan merupakan hak. Sebaliknya, hak kami menjadi kewajiban kepada pihak terkait. Di era digital sekarang, menjadi rentan jika hak dan kewajiban tidak disandingkan secara konsisten. Banyak orang melupakan kewajiban yang melekat dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan justru

⁹ *Ibid.*

menuntut keuntungan yang ingin dicapai. Sebaliknya, hak-hak yang seharusnya dijamin dan dihormati seseorang kini terabaikan, mengecewakan dan berujung pada ketidakpercayaan.¹⁰

Terjadinya hubungan hukum antara biro perjalanan dengan konsumen pengguna jasa perjalanan karena adanya barang atau jasa yang diperjualkan biro perjalanan dan dibeli oleh pengguna jasa perjalanan. Dengan begitu, Seperangkat peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mencapai keseimbangan dalam melindungi kepentingan konsumen dan pelaku perdagangan guna menciptakan perekonomian yang sehat dan stabil.

Dalam mewujudkan perekonomian yang sehat, Biro perjalanan diberikan hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pariwisata di seluruh nusantara dengan benar. Misalnya, dengan cara menawarkan atau menjual berbagai paket wisata di berbagai destinasi kepada konsumen pengguna jasa perjalanan.

Biro perjalanan memiliki beberapa hak dan kewajiban, antara lain :

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan syarat dan nilai tukar barang dan jasa yang disepakati. Dalam mewujudkan hal ini, biro perjalanan harus bisa memperlakukan atau melayani konsumen dengan jujur, serta memberikan jaminan berupa mutu produk dan jasa berdasarkan ketentuan standar yang berlaku.¹¹
- b. Hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap tindakan konsumen dengan niat atau tidak beritikad baik.
- c. Biro perjalanan juga berewajiban memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa dan menjelaskan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, jaminan kualitas barang dan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan persyaratan perjanjian.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No. 01

- d. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- e. Hak untuk memulihkan reputasi yang baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang dipertukarkan.
- f. Menjamin mutu barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ jasa yang berlaku;
- g. Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Seperti yang telah dijabarkan diatas, yaitu salah satunya adalah menjamin mutu barang dan jasa. Dalam barang yang dimaksudkan berarti semua destinasi-destinasi pariwisata yang dijual oleh Biro perjalanan dalam bentuk paket-paket tour yang telah dipromosikan. Begitu pula dengan jasa, yaitu kualitas pelayanan kepada konsumen pengguna jasa perjalanan yang harus dijaga kualitasnya dengan konsisten.

Selain hak dan kewajibannya, Biro Perjalanan sebagai pelaku usaha juga memiliki beberapa larangan yang harus ditaati, yaitu:

- a. Dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi dengan standar persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah destinasi-destinasi yang paling harus diperhatikan. Misalnya jika sebuah tempat destinasi wisata tersebut sudah dianggap tidak aman untuk dikunjungi, atau sudah tidak memenuhi standar keamanan destinasi sesuai ketentuan yang berlaku maka sudah seharusnya destinasi tersebut tidak dipromosikan.
- b. Biro Perjalanan sebagai pelaku usaha juga dilarang untuk menggunakan kata-kata atau istilah yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, dan tidak mengandung resiko tanpa keterangan yang detail.

Sampai saat ini diakui bahwa hak-hak konsumen diakui secara luas dan harus dilindungi serta dihormati yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan.
- b. Hak untuk mendapat informasi.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar.
- e. Hak atas lingkungan hidup.¹²

Kepentingan konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha harus dipertimbangkan dengan cermat. Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak jenis barang atau jasa bermunculan dan dipasarkan ke konsumen.¹³

Jika tidak hati-hati dalam memilih produk atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi oleh oknum komersial yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima barang atau jasa yang ditawarkan.¹⁴

Menurut UUPK, Konsumen pengguna jasa perjalanan juga memiliki Hak, Kewajiban, serta larangan yang harus dipenuhi dan ditaati, yaitu :

- a. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat memakai barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.
- c. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

¹² 3 Erman Rajagukguk, et al, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Maju Mundur, Bandung, 2000, hlm.39

¹³ Happy Susanto, 2008, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan", Visimedia, Jakarta, h.1

¹⁴ *Ibid.* h.2

- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁵

A. HUKUM PERJANJIAN

Pengertian perjanjian telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian ini mengundang banyak kritik dari ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.¹⁶

Suatu perjanjian juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam sebuah perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melakukan sesuatu yang disebut hak dan kewajiban yang kemudian disebut sebagai sebuah prestasi.

Prestasi-prestasi itu meliputi :

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Syarat tersebut, yaitu :

¹⁵ Rizal Al Salam, 2013, Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel, (Studi Kasus CV. Arlinta Surabaya)

¹⁶ Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 160

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁷

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

- C. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

- D. Suatu sebab yang halal. Sebab yang dimaksud adalah perjanjian itu sendiri atau tujuan para pihak mengadakan perjanjian itu halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan .

B. HUKUM PERUSAHAAN

Pengertian perusahaan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan Polak memandang

¹⁷ Ibid., hlm. 162.

perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.¹⁸ Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan.

Bertitik tolak pada definisi hukum perusahaan menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, lingkup hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam Bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau enterprise atau corporation. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya Perusahaan Otobus (PO) dan Perusahaan Dagang (PD) milik swasta perseorangan¹⁹ Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang secara pasti, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan. Kegiatan usaha sendiri memiliki arti yaitu berbagai jenis usaha dibidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan yang dimaksud pengusahaan adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Dalam bahasa inggris kegiatan usaha disebut business dan pengusaha disebut businessman.

C. Biro Perjalanan (*Travel Agency*)

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.7-8.

¹⁹ Ibid., hlm. 1

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No.Kep.16/U/II/88 tanggal 25 Februari 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan. Penelitian Umum Pasal 1 Huruf b, Biro perjalanan (travel agency) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.

Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Asosiasi Perjalanan Wisata (APW), berada di bawah naungan ASITA (Association of the Indonesian Tours dan Travel Agencies) dalam melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha biro perjalanan (travel agency) yang utama yaitu membuat atau menyusun paket wisata, menjual paket wisata tersebut kepada konsumen dan memberikan pelayanan kepada konsumen yang membeli paket wisata. Paket wisata tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu transportasi, penginapan (hotel), makan dan minuman, obyek wisata, pertunjukan yang dirangkai menjadi satu paket perjalanan dan dijual dalam satu kesatuan harga.²⁰

Di Indonesia, Usaha Jasa Biro Perjalanan pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No.Kep.16/U/II/88 Tanggal 25 Februari

1988 tentang pelaksanaan Ketentuan Usaha jasa Perjalanan, dan disebut dengan Biro Perjalanan Umum. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf b, disebutkan bahwa Biro Perjalanan Umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan ke dalam negeri dan/atau di dalam negeri dan/atau ke luar negeri. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Bab II dijelaskan bahwa Biro Perjalanan Umum memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang terdiri dari :

- a) Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;
- b) Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan/atau kelompok orang yang diurusnya;
- c) Melayani pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana wisata lainnya;
- d) Mengurus dokumen perjalanan;

²⁰ Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 58.

- e) Menyelenggarakan panduan perjalanan wisata;
- f) Melayani penyelenggaraan konvensi.

Usaha Biro Perjalanan Wisata juga diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan, yaitu sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- b) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Pariwisata.
- c) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/HK/PM.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Wisata.
- d) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Perjanjian kerjasama biro perjalanan biasanya dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian secara umum. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Dari uraian diatas maka, Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu.²¹

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit., hlm. 296.